

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN *UNDERWATER DRONE* OLEH SUATU NEGARA BERDASARKAN KONVENSII HUKUM LAUT INTERNASIONAL (STUDI KASUS: PENEMUAN *UNDERWATER DRONE* DI WILAYAH SELAYAR, SULAWESI SELATAN)

Oleh

Putu Chandra Sumerta Putra, NIM. 1814101039

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami (1) pengaturan penggunaan *Underwater Drone* menurut Konvensi Hukum Laut Internasional serta (2) kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan penemuan *Underwater Drone* di Wilayah Selayar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapat konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) menurut hukum internasional, pengaturan mengkhusus mengenai penggunaan *Drone* maritim atau *Underwater Drone* yang melewati batas negara belum terdapat regulasinya secara spesifik begitu pula dalam hukum nasional. Menurut sudut pandang dari hukum laut internasional hal tersebut adalah bentuk pelanggaran kedaulatan suatu negara khususnya jika menerobos kawasan laut teritorial suatu negara mengingiat keberadaan hak lintas damai yang melekat di kawasan tersebut sebagai tujuan damai. Oleh karenanya jika *Drone* tersebut berfungsi sebagai kebutuhan militer baik penyerangan maupun mata-mata maka hal tersebut tentu melanggar hak lintas damai sebagaimana telah diatur di dalam UNCLOS 1982. (2) Terkait dengan penemuan *Drone* di bawah laut selayar Sulawesi selatan, keamanan laut di wilayah Indonesia dinilai masih kurang karena masih terdapat *Drone* asing yang ditemukan. Menyikapi indikasi adanya ancaman maritim yang datang melalui bawah permukaan laut, strategi yang seharusnya dijalankan TNI AL adalah dengan pembangunan kekuatan bawah permukaan.

Kata Kunci : *Underwater Drone*, Hukum Laut Internasional, Selayar Sulawesi Selatan

**LEGAL REVIEW ON THE USE OF UNDERWATER DRONES BY A
COUNTRY BASED ON THE INTERNATIONAL SEA LAW CONVENTION
(CASE STUDY: DISCOVERY OF UNDERWATER DRONES IN THE
SAILING AREA, SOUTH SULAWESI)**

By

Putu Chandra Sumerta Putra, NIM. 1814101039

Law Department

ABSTRACT

This study aims to find out and understand (1) the regulation of the use of Underwater Drones according to the International Law of the Sea Convention and (2) the Indonesian government's policies related to the discovery of Underwater Drones in the Selayar Region, South Sulawesi. This research is a normative legal research that uses a law approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials that are useful for obtaining conclusions that are relevant to the problems in this study. The results of the study show that (1) according to international law, there is no specific regulation regarding the use of maritime Drones or Underwater Drones that cross national borders, as well as in national law. According to the point of view of the international law of the sea, this is a form of violation of a State, especially if the sea area of a country is considering the existence of the right of peaceful passage inherent in the area as a peaceful goal. Therefore, if the Drone serves as a military necessity, both attack and spying, then this of course violates the right of peaceful passage as regulated in UNCLOS 1982. (2) Regarding the discovery of Drones under the sea sailing south Sulawesi, maritime security in Indonesian territory considered still lacking because there are still foreign Drones found. Responding to indications of maritime threats that come through below the sea surface, the strategy that must be carried out by the Indonesian Navy is the development of subsurface forces. Indonesian nation

Keywords: *Underwater Drone, International Law of the Sea, South Sulawesi Selayar*